

DAMPAK PERUBAHAN ANGGARAN TERHADAP OUTPUT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA DALAM SISI INCOME AND SPENDING

Herlina Reva Carita¹, Haura Khalisa Hakim², Raden Naufal Hilmi Saputra³, Ni Komang Mia Fabiola⁴, Izzan Shulhan Albar⁵, Vanessa Azahra Rohman⁶, Ahmad Setiawan Nuraya⁷

¹ STIE Indonesia Banking School; herlina.20231111112@ibs.ac.id

² STIE Indonesia Banking School; haura.20231111107@ibs.ac.id

³ STIE Indonesia Banking School; raden.20231111104@ibs.ac.id

⁴ STIE Indonesia Banking School; mia.20231111101@ibs.ac.id

⁵ STIE Indonesia Banking School; izzan.20231@ibs.ac.id

⁶ STIE Indonesia Banking School; vanessa.20231111106@ibs.ac.id

⁷ STIE Indonesia Banking School; ahmad.nuraya@ibs.ac.id

Abstract

Keywords:

Budget Changes,
Revenue,
Expenditure,
Economic Growth,
GDP, Fiscal Policy.

This study aims to analyze the impact of budget changes on output and economic growth in Indonesia through the income and spending approach. Using a descriptive method that combines qualitative analysis and secondary quantitative data, this research examines data on state revenue, government expenditure, and Gross Domestic Product (GDP) from 2019 to 2024. The analysis results show that changes in budget allocation, especially during the Covid-19 pandemic, have had a significant effect on aggregate demand and the national economic performance. Although there was a decline in state revenue in 2020, increased government spending in strategic sectors successfully supported economic recovery and growth in the following years. Graphs and tables support the findings that maintaining a balance between revenue and expenditure is key to economic stability. Therefore, appropriate and adaptive fiscal policies are crucial to supporting sustainable economic growth in Indonesia.

Abstrak

Kata kunci:
Perubahan
Anggaran,
Pendapatan,
Pengeluaran,
Pertumbuhan
Ekonomi, PDB,
Kebijakan Fiskal.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dampak pada perubahan anggaran terhadap output dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pendekatan income and spending. Dengan menggunakan metode deskriptif yang menggabungkan analisis kualitatif dan data kuantitatif sekunder, penelitian ini mengkaji data pendapatan negara, belanja pemerintah, dan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun 2019 hingga 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan alokasi anggaran, terutama selama masa pandemi Covid-19, memberikan pengaruh nyata terhadap permintaan agregat dan kinerja ekonomi nasional. Meskipun terjadi penurunan pendapatan negara pada tahun 2020, peningkatan belanja pemerintah di sektor strategis berhasil mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun berikutnya. Data grafik dan tabel mendukung temuan bahwa keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran merupakan kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang tepat dan adaptif sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

*Diajukan : Juni
2025*

*Diterima : Juli
2025*

*Diterbitkan : Juli
2025*

Corresponding Author:

Herlina Reva Carita

STIE Indonesia Banking School; herlina.20231111112@ibs.ac.id

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal berperan sebagai indikator utama dalam mengarahkan aktivitas ekonomi nasional melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Di Indonesia, perubahan komposisi anggaran, baik dari sisi pendapatan (*income*) maupun pengeluaran (*spending*), secara nyata mempengaruhi output dan pertumbuhan ekonomi. Pengalihan belanja negara ke berbagai sektor yang berperan produktif dapat merangsang permintaan agregat, serta memperbaiki distribusi pendapatan.

Stabilitas ekonomi merupakan salah satu tujuan atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh setiap pemerintahan di setiap negara, karena stabilitas ekonomi merupakan indikator yang sangat penting, stabilitas ekonomi mampu menunjukkan kesehatan ekonomi suatu negara dan juga menjadi salah satu petunjuk untuk mengukurnya suatu keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu negara. Indikator yang biasa digunakan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara adalah PDB (Produk Domestik Bruto).

PDB (Produk Domestik Bruto) adalah kekuatan bagi negara dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Konsumsi masyarakat menjadi penyumbang terbesar bagi PDB Indonesia. Dilansir dari [Indonesia.go.id](https://www.indonesia.go.id), konsumsi rumah tangga menjadi andalan utama bagi PDB Indonesia sebesar 54% terhadap ekonomi Indonesia.

Hal ini menjadikan pendapatan masyarakat sebagai Pendekatan income and spending memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian serta mendorong permintaan agregat dan menciptakan multiplier effect terhadap sektor-sektor produktif. Kebijakan fiskal memegang peranan strategis dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal berperan penting dalam mempengaruhi perekonomian dan permintaan agregat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui pengeluaran pemerintah dan perpajakan, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, Dalam konteks ini pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Dengan demikian, analisis terhadap dampak perubahan anggaran dalam konteks pendapatan dan pengeluaran sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods namun dengan dominasi kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai dampak perubahan anggaran terhadap output dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari sisi income and spending. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena ekonomi yang kompleks melalui penelusuran data dan informasi naratif, sekaligus menganalisis data kuantitatif sekunder yang mendukung temuan. Studi kasus juga digunakan untuk memperkuat analisis, terutama dengan mengkaji secara khusus perubahan anggaran selama masa pandemi. Sumber Data

Seluruh data yang digunakan bersifat dokumentatif dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya dan kredibel, seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, artikel dari media online, serta dokumen resmi terkait kebijakan fiskal dan anggaran negara. Teknik Pengumpulan Data Mengumpulkan berbagai macam informasi dari beberapa sumber relevan yang sudah dapat diakses. Sumber-sumber tersebut terdiri dari publikasi ilmiah, dokumen resmi pemerintah, artikel berita online, dan makalah resmi tentang kebijakan fiskal pemerintah dan anggaran negara. Teknik Analisis Data Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan hubungan antara perubahan anggaran pemerintah dengan indikator makro ekonomi seperti konsumsi, permintaan agregat, pendapatan nasional, dan pertumbuhan ekonomi. Analisis ini mengacu pada teori ekonomi makro, khususnya teori Keynes tentang peran pengeluaran pemerintah dalam memengaruhi permintaan agregat dan output. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta memberikan dasar analisis bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat di masa mendatang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan

Perubahan anggaran pemerintah dan permintaan agregat

Rebudgeting, atau revisi anggaran, merupakan tindakan modifikasi terhadap rencana finansial yang telah disusun. Modifikasi ini dapat berupa peningkatan atau penurunan alokasi dana pada pos-pos anggaran negara. Latar belakang dan alasan yang mendasari perubahan pada setiap komponen APBD memiliki dampak langsung kepada permintaan agregat, yaitu total permintaan barang dan jasa dalam suatu ekonomi yang mencakup konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto.

Salah satu contoh nyata terkait perubahan anggaran yang terjadi ketika Pandemi Covid-19 melanda pada suatu daerah di Indonesia:

Dimulai pada kuartal pertama tahun 2020, epidemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk mengubah seluruh anggarannya. Semua pemerintah daerah menerapkan keputusan yang dipilih secara selektif. Sebelum epidemi, APBD nasional untuk tahun 2020 mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp 1.238. 51 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 1.299. 03 triliun. Namun, pendapatan daerah diperkirakan akan turun sebesar Rp 228. 56 triliun sebagai konsekuensi dari krisis Covid-19, sehingga totalnya menjadi hanya Rp 1.009. 95 triliun. Pelemahan ekonomi dan pembatasan aktivitas menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) turun sebesar Rp114,53 triliun. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Ishak (2021), transfer ke pemerintah daerah turun sebesar Rp 94. 2 triliun karena sebagian anggaran digunakan untuk penanganan Covid-19 secara terpusat. Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), Kusnandar dan Siswantoro (2012), Setyarini dan Rustiyaningsih (2021), Nurdiwaty dkk. (2017), dan Arwati dan Hadiati (2013) mengungkapkan adanya pengaruh positif PAD terhadap belanja modal.

Defisit keuangan dan utang yang lebih besar merupakan hasil dari dampak Covid-19 terhadap situasi fiskal pemerintah daerah, yang berdampak pada pengeluaran dan pendapatan. Sebagai contoh, anggaran Kota Bukittinggi mengalami penurunan yang signifikan pada tingkat pertumbuhan ekonomi kota, turun menjadi 1,13%, dengan total pendapatan turun sebesar 14,08% dari 804 miliar menjadi sekitar 990 miliar. 08% dari 804 miliar menjadi sekitar 690 miliar. Awalnya ditetapkan sebesar 996 miliar, total alokasi belanja pemerintah turun 11,28% menjadi 883 miliar, sedangkan satu pos tertentu - Belanja Tak Terduga (BTT) - meningkat 2.119,48%. Pengeluaran yang terkait dengan penanggulangan Covid-19, yang termasuk dalam kategori pengeluaran BTT ini, bertanggung jawab atas peningkatan anggaran BTT. Awalnya ditetapkan sebesar 2,2 miliar rupiah pada tahun 2020, BTT Kota Bukittinggi dinaikkan menjadi 69 miliar rupiah sebagai akibat dari kondisi mendesak yang ditimbulkan oleh bencana non-alam yang menyerang global ini. Tiga domain utama penanggulangan Covid-19 - manajemen kesehatan, bantuan keuangan, dan jaring pengaman sosial - akan mendapatkan pendanaan ini. Menurut Nabila dan rekan-rekannya, anggaran ini nantinya akan dibagi kepada tujuh instansi pemerintah daerah yang berkolaborasi untuk memberikan manfaat bagi seluruh penduduk Kota Bukittinggi.

Permintaan agregat menggambarkan total permintaan barang dan jasa di dalam suatu negara pada tingkat harga dan waktu tertentu. Pada dasarnya, permintaan agregat berfungsi sebagai pengukur pengeluaran keseluruhan untuk setiap barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara. Menghitung permintaan agregat memerlukan penghitungan total konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu. Ini mencakup semua barang konsumsi, barang modal yang diperlukan untuk produksi, aktivitas perdagangan yang terkait dengan ekspor dan impor, serta pengeluaran publik oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah komponen penting dalam mengukur permintaan total. Pengeluaran ini mewakili permintaan yang terkait dengan inisiatif pemerintah, seperti investasi di bidang infrastruktur dan penyediaan layanan publik.

Selain itu, pengeluaran pemerintah biasanya dianggap sebagai variabel eksogen, artinya keputusan para pemerintah untuk membelanjakan anggaran tidak secara langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, atau suku bunga. Dengan demikian, perubahan pada anggaran pemerintah, khususnya jika mengarah pada defisit anggaran, akan berpengaruh terhadap permintaan agregat. Defisit anggaran berarti pemerintah membelanjakan lebih banyak daripada pendapatannya, sehingga dapat meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian.

Memperluas jumlah uang beredar akan menghasilkan peningkatan kebutuhan masyarakat akan uang, oleh karena itu mendanai kekurangan anggaran jangka pendek menjadi mungkin. Hal ini diakibatkan oleh penurunan daya beli mata uang di negara tersebut. Dengan kata lain, masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk membayar biaya hidup mereka. Akibatnya, strategi pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran dengan menyuntikkan lebih banyak uang ke dalam perekonomian memiliki

kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan (Mankiw, 2002). Teori Keynes menyatakan bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh beberapa variabel termasuk suku bunga (i), harga (P), dan jumlah produk (Q). Selain itu, peningkatan permintaan uang diperkirakan akan memicu penurunan investasi; penurunan investasi seringkali menyebabkan penurunan permintaan total. Pada akhirnya, peningkatan pertama dalam permintaan total diikuti dengan penurunan berikutnya akan bergabung untuk menciptakan keseimbangan baru.

Dampak Terhadap Output Melalui Pendekatan Spending (pengeluaran pemerintah & Pertumbuhan Ekonomi)

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh belanja yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, seperti pembelian barang dan jasa, gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, subsidi, dan bantuan sosial. Dana pengeluaran berasal dari penerimaan negara seperti pajak, bea cukai, dan pinjaman, serta tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengeluaran ini dapat mendorong produksi barang dan jasa serta meningkatkan pendapatan total dalam perekonomian, sesuai teori Keynes yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah menstimulasi permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, berbagai kebijakan diterapkan. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal, sebuah strategi ekonomi yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variasi dalam jumlah dan komposisi anggaran pemerintah, termasuk pajak dan pengeluaran, dapat berdampak pada distribusi pendapatan, pola distribusi sumber daya, dan faktor permintaan secara keseluruhan, serta tingkat aktivitas ekonomi. Perubahan dalam tingkat dan komposisi anggaran pemerintah, termasuk pajak dan pengeluaran, dapat berdampak pada distribusi pendapatan, distribusi sumber daya, tingkat aktivitas ekonomi, dan variabel permintaan agregat. Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran pemerintah, khususnya langkah pemerintah untuk mengatur arah perekonomian dengan menetapkan tingkat penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan kebijakan fiskal ini adalah untuk mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menstabilkan harga, tingkat produksi, dan prospek pekerjaan. Aspek terpenting dari pembangunan adalah ekspansi ekonomi.

Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan pembangunan ekonomi suatu negara. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan dapat berbeda berdasarkan cara pembiayaannya. Pendanaan yang sangat bergantung pada defisit anggaran yang signifikan atau tingkat utang yang tinggi dapat menyebabkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi atau inflasi, yang dapat berdampak negatif pada perekonomian. Di sisi lain, pendanaan yang hati-hati dan berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya domestik dan investasi eksternal yang dikelola dengan baik dapat memberikan dukungan yang konsisten untuk kemajuan ekonomi jangka panjang (Pratama et al., 2024). Kemajuan suatu negara atau wilayah dinilai dari

tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pendekatan umum untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan menghitung persentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 3.2
Alokasi Belanja Negara Tahun 2019-2024

No	Produk Domestik Bruto			Alokasi Belanja Negara
	Tahun	Nominal (triliun Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Jumlah (triliun Rp)
1	2019	15.833,9	5,02	2.461,1
2.	2020	15.432,2	2,07	2.589,9
3	2021	16.970,8	3,69	2.784,4
4	2022	19.588,4	5,31	3.090,8
5	2023	20.892,4	5,05	3.121,9
6	2024	22.139,0	5,03	3.350,3

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), 2024.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup stabil dari tahun 2019 hingga 2024. PDB nominal meningkat dari Rp15.833,9 triliun pada 2019 menjadi Rp22.139,0 triliun pada 2024, dengan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 2,07% hingga 5,31% per tahun.

Sementara itu, alokasi belanja negara juga menunjukkan tren peningkatan dari Rp2.461,1 triliun pada 2019 menjadi Rp3.350,3 triliun pada 2024. Hal ini menandakan adanya upaya pemerintah untuk memperbesar anggaran guna membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Meskipun alokasi belanja negara meningkat secara signifikan, pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkat secara proporsional setiap tahun, seperti yang terlihat pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi hanya 2,07% akibat kondisi global yang menantang. Namun, alokasi belanja yang terus bertambah menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mempercepat pembangunan.

Dampak Terhadap Pendapatan Melalui Pendekatan Income (Pendapatan nasional & rumah tangga)

Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh setiap rumah tangga di suatu negara dari penggunaan input produksi selama periode waktu tertentu. Pendapatan nasional membantu mengevaluasi keberhasilan ekonomi suatu negara dan menunjukkan nilai total semua produk dan layanan yang dihasilkan selama periode tersebut. Pendapatan nasional berfungsi sebagai kriteria untuk menilai keseluruhan output suatu negara dalam bentuk barang dan jasa yang diproduksi selama periode tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh Yanto pada tahun 2003. Ukuran-ukuran seperti produk domestik bruto (PDB) dan produk nasional bruto (PNB) dapat membantu seseorang untuk memperkirakan lebih jauh pendapatan masyarakat.

Pendekatan income dalam pendapatan nasional adalah metode perhitungan yang menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Pendapatan ini meliputi upah (wages), sewa (rent), bunga (interest), dan keuntungan (profit). Rumus pendekatan income dapat ditulis sebagai: $Y = R + W + I + P$

di mana Y adalah pendapatan nasional, R sewa, W upah, I bunga, dan P keuntungan.

Penting untuk diketahui bahwa pendapatan nasional tidak hanya mencakup hasil produksi domestik tapi juga pendapatan yang diperoleh oleh warga negara dari luar negeri. Hal ini karena angka pendapatan nasional memberikan gambaran tentang seberapa baik ekonomi suatu negara mengelola sumber ekonominya dan seberapa besar kontribusi sektor- sektor ekonomi terhadap pertumbuhan. Komponen penting dalam pendapatan nasional seperti PDB atau GDP, NDP, GNP, NNP, NNI, pendapatan domestik dan pendapatan pribadi memberikan gambaran perhitungan tentang kesehatan ekonomi suatu negara.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai total pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun. PDB mencakup produksi yang dilakukan oleh warga negara sendiri maupun perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tersebut. Karena belum dikurangi penyusutan barang modal, PDB disebut bruto atau kotor. PDB menjadi indikator penting untuk mengukur kesehatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapatan rumah tangga merupakan bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh individu atau keluarga sebagai pemilik faktor produksi. Pendapatan ini digunakan untuk berbagai keperluan, terutama konsumsi, tabungan, dan investasi. Konsumsi rumah tangga berperan penting dalam mendorong permintaan barang dan jasa di pasar, sehingga menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam pendapatan nasional dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 60-75% dari

pendapatan nasional dan PDB, sehingga konsumsi ini sangat menentukan fluktuasi dan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (PNB) mewakili nilai moneter lengkap dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama periode dua belas bulan, di mana pun itu terjadi secara global.

GNP menentukan jumlah yang dihasilkan dengan memeriksa siapa yang memilikinya, jadi GNP menghitung uang yang diperoleh orang dari investasi dan manufaktur di luar negeri, sambil mengambil uang yang dihasilkan oleh non-warga negara di dalam negeri.

Rumus:

$$\text{GNP} = \text{GDP} - \text{Produk netto terhadap luar negeri}$$

Produk Nasional Neto (NNP)

Dari produk nasional bruto, kita menentukan produk nasional neto dengan mengurangi depresiasi, atau pengurangan nilai aset modal. Sering dikenal sebagai biaya penggantian, penurunan nilai ini mencerminkan investasi yang diperlukan untuk mengganti aset modal atau memperhitungkan penyusutan peralatan manufaktur selama proses produksi barang dan jasa. Karena perhitungan ini bergantung pada estimasi, maka perhitungan ini mungkin tidak sepenuhnya benar dan dapat menyebabkan kesalahan, meskipun margin kesalahannya biasanya kecil. Rumus:

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Penyusutan}$$

Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (NNI) adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat sebagai pemilik aset produksi setelah penyusutan barang modal, pajak tidak langsung, dan subsidi diperhitungkan. NNI memberikan gambaran setahun tentang pendapatan bersih asli yang diperoleh masyarakat dari memproduksi barang dan jasa.

Rumus: $\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak Tidak Langsung}$

Pendapatan perseorangan (PI)

Pendapatan pribadi adalah pendapatan gabungan yang diperoleh setiap individu dalam suatu masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa ikut serta dalam aktivitas keuangan langsung. Ini juga termasuk pembayaran transfer seperti pensiun dan tunjangan sosial yang tidak terkait dengan produksi tahun berjalan.

Rumus: $\text{PI} = \text{NNI} + \text{Pembayaran transfer} - (\text{berbagai kontribusi, pajak pribadi, dll.})$

Disposable Income (DI)

Disposable income adalah pendapatan yang dimiliki seseorang atau keluarga setelah dikurangi pajak langsung dan potongan-potongan lain yang diperlukan. Jumlah ini dapat diinvestasikan, ditabung, atau dibelanjakan.

Rumus: $DI = PI - \text{Pajak Langsung}$

Keseimbangan antara Income dan Spending untuk Pertumbuhan Ekonomi

Mempertahankan stabilitas dan memajukan pertumbuhan ekonomi di dalam negara seperti Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam perspektif makroekonomi, pendapatan nasional biasanya digunakan untuk merepresentasikan keseimbangan ini; pendapatan nasional secara keseluruhan (Y) yang dibutuhkan untuk menyamai total pengeluaran agregat, yang meliputi konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor (X) dikurangi impor (M). Keseimbangan ini memastikan bahwa total permintaan (pengeluaran) dari pasar domestik dan luar negeri akan menyerap setiap barang dan jasa yang diproduksi (pendapatan). Untuk mencapai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian empat sektor, diperlukan rumus dasar berikut ini:

$$Y=C+I+G+(X-M)$$

Y : Pendapatan nasional

C : Konsumsi rumah tangga

I : Investasi

G : Pengeluaran pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah ukuran pendapatan suatu negara. PDB mewakili nilai total pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara selama periode waktu tertentu, dan berfungsi sebagai indikator utama pendapatan nasional. Dalam konteks pendapatan nasional, PDB mencerminkan total nilai tambah yang diciptakan oleh semua bisnis di suatu negara, termasuk yang dimiliki oleh warga negara dan orang asing yang beroperasi di dalam negeri.

Pendapatan rumah tangga meningkat seiring dengan tingkat pengeluaran mereka, konsumsi rumah tangga secara signifikan mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB). Hubungan antara pendapatan dan pengeluaran ini dikenal sebagai Kecenderungan untuk Berkonsumsi. Salah satu bentuk pendapatan dapat berasal dari peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya produksi: peningkatan kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi mengukur kapasitas aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi penduduk dalam rentang waktu tertentu. Proses ekonomi sebagian besar melibatkan penggunaan sumber daya produksi untuk menghasilkan output, yang kemudian menghasilkan pasokan layanan untuk input produksi yang dimiliki masyarakat. Idenya adalah bahwa ekspansi ekonomi akan meningkatkan pendapatan pribadi dan mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Selain itu pendapatan negara di Indonesia secara umum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sumber dari pajak, sumber bukan dari pajak, dan pendapatan dari hibah. 3 sumber pendapatan tersebut masih bisa menjadi beberapa macam, berikut penjelasan dan detailnya.

Sumber Pendapatan Negara Dari Pajak

Pajak merupakan komponen utama dalam struktur penerimaan negara, yang menyumbang lebih dari 80% terhadap total pendapatan nasional. Instrumen pajak terbagi ke dalam berbagai jenis sesuai dengan karakteristik objek dan subjek pajaknya. Pendapatan PPH, yang dikumpulkan oleh negara dikenal sebagai pendapatan PPH. Baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia, pajak ini mencakup pendapatan yang diperoleh orang dan perusahaan, sehingga menjadikan PPH sebagai sumber pendapatan utama.

Pendapatan PPN, PPN merupakan sumber pendapatan terbesar kedua bagi negara. Pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 828,5 triliun, sekitar 8,6% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pendapatan Cukai, Pajak yang dipungut Pemerintah atas barang-barang tertentu yang memerlukan pengendalian dan pengawasan dikenal sebagai cukai. Dengan nilai Rp226,4 triliun, pendapatan cukai pada tahun 2024 diperkirakan akan naik 2,0% dari tahun sebelumnya. Tembakau berkontribusi sebesar Rp 216.9 triliun; minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) menyumbang Rp9,2 triliun; etil alkohol (EA) menyumbang Rp141. 1 miliar.

Pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar, Bea masuk adalah pungutan pemerintah atas produk yang diimpor atau diekspor. Anggaran untuk pajak impor cukup besar untuk tahun 2024, diperkirakan menghasilkan Rp 53. 0 triliun, meningkat 4.1% dari tahun sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi impor dan mendorong penggunaan sumber daya dan kapasitas lokal. Di sisi lain, pajak ekspor lebih rendah, diperkirakan mencapai Rp 20,9 triliun, yang menunjukkan peningkatan 53,6% dari tahun ke tahun. Minyak kelapa sawit, pasir besi, dan rotan adalah beberapa dari bahan-bahan yang belum diolah atau setengah diolah yang hanya dikenakan kewajiban ini. Umumnya yang dikecualikan dari pajak ekspor ini adalah barang-barang ekspor yang bersifat inventif dan usaha-usaha kecil dan menengah yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pendapatan PBB, Sebagian dari pendapatan negara berasal dari dana yang dikumpulkan melalui pajak properti; hingga Agustus 2024, pendapatan dari pajak ini dan pajak yang sebanding berjumlah sekitar Rp 15,76 triliun. Hampir setiap bidang tanah dan bangunan yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan atau orang dikenakan pajak negara. Namun, beberapa tempat tertentu dibebaskan dari pajak ini: tempat ibadah, tempat pemakaman, hutan lindung, dan area alami yang dikelola oleh pemerintah federal. Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan pajak lainnya merujuk pada penerimaan negara yang berasal dari jenis pajak yang tidak diklasifikasikan ke dalam kategori pajak-pajak utama yang telah disebutkan sebelumnya.

Sumber Pendapatan Pemerintah yang Tidak Berasal dari Pajak

Meskipun pendapatan PNBPN pemerintah masih jauh lebih kecil daripada pendapatan dari pajak, namun kesehatan fiskal negara sangat bergantung pada PNBPN.

Berdasarkan berbagai bidang tersebut, pendanaan yang berasal dari PNBP berasal dari berbagai tindakan pemerintah. PNBP SDA Migas, pemanfaatan SDA Migas atau Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi terus digenjut oleh pemerintah. Tahun 2021 pendapatan SDA Migas sekitar Rp 97 triliun, tahun 2022 pendapatan SDA Migas mencapai Rp 148,7 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan tahun 2023 pendapatan SDA Migas tercatat sebesar Rp 117 triliun, sedikit menurun dari 2022 namun masih lebih tinggi dibandingkan 2021. Penurunan ini mengikuti tren harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang menurun dari tahun 2022 ke 2023.

Pendapatan Kekayaan Yang Dipisahkan, Kekayaan negara yang dipisahkan adalah klasifikasi uang negara yang berasal dari distribusi laba perusahaan milik negara (BUMN). Di antara banyak BUMN di Indonesia, terdapat PT Jasa Raharja, PT Bank Mandiri, PT Pegadaian, PT Wijaya Karya, Perum Bulog, dan PT Garuda Indonesia. Secara keseluruhan, BUMN-BUMN ini menghasilkan pendapatan sebesar Rp 2.292,5 triliun pada tahun 2021, Rp 2.916 triliun pada tahun 2022, dan Rp 2.932,6 triliun pada tahun 2023.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, sebuah organisasi yang dikelola pemerintah-sering dikenal sebagai Badan Layanan Umum-ada. BLU lebih mementingkan membantu masyarakat daripada menghasilkan uang meskipun menggunakan layanan tersebut memiliki biaya tertentu. Misalnya, semua rumah sakit dan universitas yang dikelola pemerintah dikategorikan sebagai BLU, sehingga menjadikan institusi kesehatan dan pendidikan sebagai komponen terbanyak.

PNBP SDA Non Migas, Sumber Daya Alam Non Migas Tidak termasuk minyak bumi dan gas alam, frasa "sumber daya alam nonmigas" menunjukkan penggunaan bahan-bahan yang ada di alam. Bagian terbesar dari pendapatan pemerintah dari sumber daya alam non-migas di Indonesia berasal dari penggalan mineral dan batubara, diikuti oleh sektor perikanan, penangkapan ikan, dan penggunaan energi panas bumi.

PNBP Lainnya, Seperti BLU, sebagian besar sumber PNBP lainnya dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah. Beberapa aktor utama dalam pengelolaannya antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, serta Kementerian Perhubungan. PNBP jenis ini mencakup seluruh potensi pendapatan negara di luar kategori utama yang telah disebutkan sebelumnya.

Sumber Pendapatan Negara Dari Hibah

Hibah merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang diperoleh secara cuma-cuma tanpa adanya kewajiban pengembalian atau ikatan kontraktual tertentu. Berbeda dengan pinjaman, hibah tidak menimbulkan beban tanggung jawab fiskal di masa depan, sehingga murni bersifat bantuan. Sumber hibah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan International Monetary Fund (IMF). Sementara itu, dalam aspek pengeluaran, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai

pengatur ekonomi, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam menentukan arah belanja negara. Pengeluaran pemerintah mencakup semua tingkatan dari pusat hingga daerah—dan keputusan fiskal pada tiap tingkat ini mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong permintaan agregat, merangsang investasi, serta berkontribusi terhadap peningkatan output nasional. Untuk menunjang operasionalisasi pemerintahan secara efektif, dibutuhkan pengeluaran rutin serta pembiayaan pada sektor-sektor strategis lainnya yang turut membentuk struktur total belanja negara.

- (1) prinsip-prinsip dasar ekonomi
- (2) kebutuhan manajemen pemerintah
- (3) strategi pertumbuhan
- (4) ancaman: bencana lingkungan, dampak resesi ekonomi global
- (5) kebijakan bantuan keuangan
- (6) faktor dan peraturan lebih lanjut.

Asumsi terkait harga minyak mentah (ICP), nilai tukar, perkiraan konsumsi bahan bakar bersubsidi, serta regulasi penetapan harga energi menjadi dasar dalam perhitungan pengeluaran subsidi energi oleh pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan anggaran rutin tersebut, sehingga tercipta keselarasan antara jumlah pengeluaran dan hasil yang diperoleh seperti; Pengeluaran rutin pemerintah merupakan pengeluaran yang terjadi secara berkala dan dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga akhir April 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02% dari PDB. Surplus ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp810,5 triliun, sekitar 27% dari target APBN 2025, sementara realisasi belanja mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3% dari pagu anggaran. Capaian ini mencerminkan kinerja APBN yang tetap solid dalam mendukung program prioritas nasional dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, APBN juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara.

Analisis: Hubungan Income, Spending, dan Output

Dalam konteks kebijakan fiskal, hubungan antara income (pendapatan), spending (pengeluaran), dan output (hasil ekonomi) merupakan aspek kunci dalam memahami dampak perubahan anggaran terhadap perekonomian. Berdasarkan teori Keynes, peningkatan pengeluaran pemerintah (government spending) dapat mendorong permintaan agregat, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional (income) dan output (produksi barang dan jasa).

Dalam studi ini, penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah, khususnya selama pandemi Covid-19, menunjukkan adanya pergeseran alokasi belanja untuk

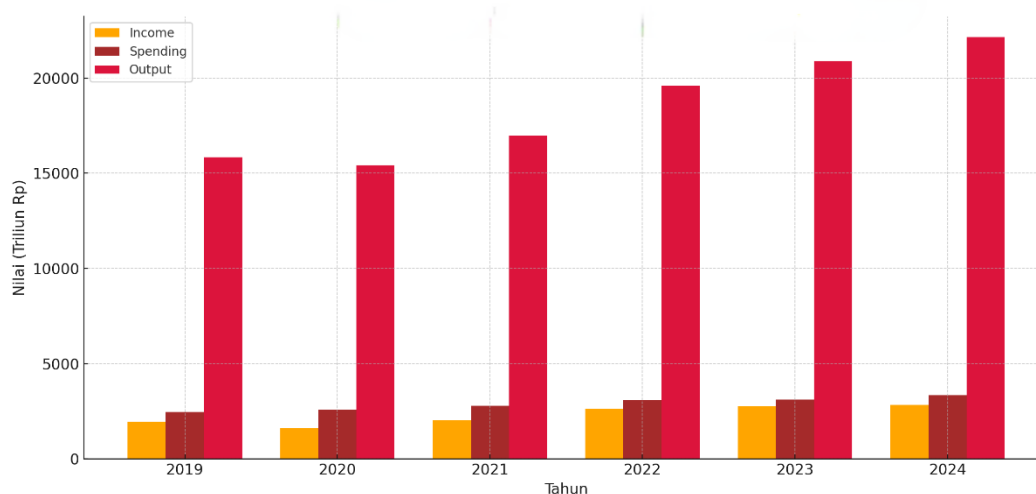
sektor-sektor strategis seperti kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan spending, yang kemudian memberi pengaruh terhadap kenaikan permintaan agregat dan output. Sementara itu, pendapatan negara (income), yang sebagian besar berasal dari pajak, cenderung mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi, namun didukung oleh stimulus fiskal yang bersifat ekspansif. Dengan demikian, terdapat keterkaitan erat antara pengeluaran pemerintah dan output ekonomi, di mana belanja fiskal yang efektif mampu menjadi instrumen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperbaiki struktur pendapatan negara di jangka menengah hingga panjang.

Tabel 3.5 Analisis Income, Spending, dan Output

Tahun	Income (Triliun Rp)	Spending (Triliun Rp)	PDB/Output (Triliun Rp)	Pertumbuhan Ekonomi
2019	1.960,63	2.461,1	15.833,9	5,02
2020	1.633,6	2.589,0	15.432,2	2,07
2021	2.011,35	2.784,4	16.970,8	3,69
2022	2.626,4	3.090,8	19.588,4	5,31
2023	2.774,3	3.121,9	20.892,4	5,05
2024	2.842,5	3.350,3	22.139,0	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, diolah dari IndonesiaBaik.id

Diagram 3.5 Perbandingan Income, Spending, dan Output 2019-2024



Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa income, spending, output Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif dari tahun ke tahun, Meskipun ada perlambatan di 2020, ekonomi berhasil pulih dengan cepat dan menunjukkan kestabilan yang baik melalui angka pertumbuhan yang sehat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan respon yang efektif dari berbagai sektor ekonomi serta kebijakan pemerintah yang mendukung pemulihan.

Pada tahun 2019, income tercatat sebesar Rp 1.960,63 triliun dan spending sebesar Rp 2.461,1 triliun, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 15.833,9 triliun dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Namun, di tahun 2020, pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp 1.633,6 triliun, sementara spending sedikit meningkat menjadi Rp 2.589,0 triliun. Penurunan income tersebut diikuti oleh penurunan PDB menjadi Rp 15.432,2 triliun serta pertumbuhan ekonomi yang melambat tajam menjadi 2,07%, mencerminkan dampak signifikan dari pandemi COVID-19.

Memasuki tahun 2021, pemulihan ekonomi mulai terlihat. Income mulai naik menjadi Rp 2.011,35 triliun, dan diikuti oleh peningkatan spending menjadi Rp 2.784,4 triliun. PDB juga tumbuh menjadi Rp 16.970,8 triliun, dengan peningkatan ekonomi membaik ke 3,69%. Tren positif berlanjut di tahun 2022, dimana income melonjak ke Rp 2.626,4 triliun, dan spending mencapai Rp 3.090,8 triliun PDB turut meningkat menjadi Rp 19.588,4 triliun, disertai pertumbuhan ekonomi yang kembali kuat di angka 5,31%. Pada tahun 2023, income dan spending terus meningkat masing-masing menjadi Rp 2.774,3 triliun dan Rp 3.121,9 triliun. PDB tercatat sebesar Rp 20.892,4 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5,05%. Dan yang terakhir pada prediksi tahun 2024, income diperkirakan mencapai Rp 2.842,5 triliun dan spending Rp 3.350,3 triliun. PDB pun diproyeksikan naik menjadi Rp 22.139,0 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi dipertahankan di sekitar 5,03%. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa walaupun sempat mengalami penurunan pada masa pandemi, Indonesia berhasil bangkit dan mempertahankan tren pertumbuhan yang positif baik dari sisi hal

pendapatan, belanja, maupun output ekonomi. Keseimbangan antara peningkatan income dan spending, serta perbaikan PDB, menjadi indikasi positif untuk prospek ekonomi nasional di masa mendatang.

KESIMPULAN

Perubahan anggaran pemerintah, baik dalam bentuk peningkatan belanja maupun perubahan dalam pendapatan negara, memiliki dampak signifikan terhadap output dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sisi income, peningkatan penerimaan negara (seperti pajak) dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun jika tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pelaku usaha. Terutama pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, mampu mendorong permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan investasi jangka panjang. Namun perlu diimbangi dengan pengelolaan defisit dan utang negara yang bijak agar tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi makro di masa depan.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, disusun beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan:

Meningkatkan Efisiensi Belanja Negara: Pemerintah diharapkan lebih memfokuskan pengeluaran pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, guna memaksimalkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Mengembangkan Sumber Pendapatan yang Lebih Beragam: Ketergantungan yang tinggi pada penerimaan pajak perlu dikurangi dengan memperkuat kontribusi dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), optimalisasi aset negara, serta pengembangan potensi ekonomi baru seperti ekonomi digital dan sektor energi.

Membangun Sistem Penganggaran yang Fleksibel: Diperlukan sistem perencanaan anggaran yang adaptif terhadap kondisi yang berubah-ubah, baik karena krisis global maupun kejadian domestik, agar kebijakan fiskal dapat segera menyesuaikan arah untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Penguatan Data dan Monitoring Fiskal: Pengembangan sistem informasi fiskal yang terpadu dan akurat menjadi penting untuk memastikan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran serta mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan efisien.

Meningkatkan Literasi Ekonomi Masyarakat: Upaya edukasi tentang peran dan dampak kebijakan fiskal perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami pentingnya pengelolaan anggaran negara dan dapat berkontribusi secara aktif dalam pengawasan publik.

Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam

pelaksanaan anggaran, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah.

Diharapkan, melalui penerapan saran-saran ini, kebijakan fiskal Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap tantangan ekonomi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020, Februari 5). Ekonomi Indonesia 2019 tumbuh 5,02 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.htm>
- Badan Pusat Statistik. (2021, Februari 5). Ekonomi Indonesia 2020 turun sebesar 2,07 persen (c-to-c). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen%E2%80%93c-to-c.html>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024, Januari 24). *Penerimaan Bea Cukai tahun 2024 tumbuh positif*. <https://www.beacukai.go.id/berita/penerimaan-bea-cukai-tahun-2024-tumbuh-positif.html>
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Hasan, M. I. (2023). Analisis peranan pajak dalam APBN dan pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 45–55. [https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp73df7f120efull.pdf](https://journal.unair.ac.id/download/fullpapers-admp73df7f120efull.pdf)
- Hutahaean, P. (2019). Belanja negara dan pertumbuhan ekonomi Indonesia: Analisis kointegrasi dan kausalitas. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 3(2), 104–115. <https://doi.org/10.31685/kek.V3i1.411>
- Indonesia.go.id. (2024, Mei 30). *APBN 2025 tetap optimal, pijakan menapaki 2026*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9411/apbn-2025-tetap-optimal-pijakan-menapaki-2026?lang=1>
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (n.d.). *Analisis realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor tahun anggaran 2022*. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 13(2), 108–120. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/download/4622/2123>
- Jossama. (2023). Peran pajak dalam mendukung pendapatan negara. *JOSSAMA: Jurnal Sosial, Sains, dan Manajemen*, 1(1), 22–28. <https://jossama.com/index.php/journal/article/view/32/27>
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (n.d.). *Profil ekonomi Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/profil-ekonomi-indonesia/>
- Keynes, J. M. (2006). *Teori umum tentang tenaga kerja, bunga, dan uang* (terj. R. Boediono). Pustaka Pelajar. (Karya asli diterbitkan 1936).
- Komalawati, K., Romdon, A. S., & Saidah, Z. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga di Indonesia. *Jurnal KaliAgri*, 3(2), 1–11. ISSN: 2774–714X.
- Mankiw, N. G. (2016). *Principles of economics* (7th ed.). Cengage Learning.
- Novita, M. (2022). *Pendapatan nasional, multiplier, dan inflasi [Bahan ajar]*. Universitas PahlawanTuankuTambusai. <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/4994-materials.pdf>

- Pajakku. (2024, Februari 12). *Penerimaan PPN diproyeksi capai target meski restitusi naik*. <https://artikel.pajakku.com/penerimaan-ppn-diproyeksi-capai-target-meski-restitusi-naik/>
- Pluang. (2023, Oktober 2). *Permintaan agregat adalah: Pengertian dan faktor yang memengaruhinya*. <https://pluang.com/blog/glossary/permintaan-agregat-adalah>
- Pratama, R., Hidayat, M., & Sari, N. P. (2024). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 18(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jekf.v18i1.2024>
- Putri, I. A. (2021). Analisis Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2000–2019 (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Putri, M. D., & Aimon, H. (2024). Analisis pengeluaran pemerintah dan likuiditas perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(4), 663–670. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/download/119/82/380>
- Rumbia, N., Urip, T. P., & Indahyani, R. (2015). Analisis hubungan realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura tahun 2003–2013. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2(2), 50–64.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, Februari 7). BPS: Ekonomi Indonesia tumbuh 3,69 persen pada 2021. <https://setkab.go.id/bps-catat-ekonomi-indonesia-tumbuh-369-persen-pada-2021/>
- Swaramarinda, D. R., & Indriani, S. (2011). Pengaruh pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 9(2), 95-105.
- Universitas Medan Area. (2021, November 12). *Apa saja sumber pendapatan negara Indonesia?* <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/apa-saja-sumber-pendapatan-negara-indonesia/>
- Yoshanda, A. A. (2020). *Pendapatan Nasional. Pendapatan Nasional*.
- Yulius, A., & Widyaningrum, A. (2023). Analisis kontribusi penerimaan pajak pusat terhadap pendapatan negara tahun 2017–2021. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 12(2), 62–70. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2369/1668>